

IDENTIFIKASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI INSTRUMEN INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA KAWASAN PARIWISATA PESISIR DI PANTAI AMAHAMI DAN NI'U

Anggun Wardenia, Fariz Primadi Hirsan

Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram

Ang9unwardenia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 04-11-2017
Disetujui: 28-01-2018

Kata Kunci:

Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Insentif dan Disinsentif
Pariwisata Pesisir

ABSTRAK

Abstrak: Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u perlu dilakukan mengingat daerah tersebut merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata dan kawasan strategis perekonomian yang ada di Kota Bima, dengan dilakukannya suatu pengendalian diharapkan pemanfaatan ruang yang ada pada kawasan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana pola ruang Rasanae Barat, salah satu instrumen yang tepat untuk digunakan selain peraturan zonasi adalah instrumen insentif dan disinsentif, dimana instrumen insentif diberikan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang taat dan tertib terhadap tata ruang, sedangkan disinsentif diberikan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang tidak tertib atau melanggar tata ruang.

Abstract: *Control of spatial use in coastal tourism area of Amahami and Ni'u needs to be done considering that the area is one of strategic area of tourism and strategic area of economy in Bima City, by doing a control is expected to utilization of existing space in the area can run in accordance with the West Rasanae spatial plan, one of the right instruments for use other than the zoning regulation is the incentive and disincentive instrument, where the incentive instrument is given to the government or a devout and orderly society to the spatial, while the disincentive is given to the government or society that is not orderly or violate spatial.*

A. PENDAHULUAN

Kawasan pesisir pantai Ni'u dan Amahami yang berfungsi sebagai kawasan pariwisata juga terdapat pemanfaatan ruang sebagai kawasan perdagangan serta jasa. Hal ini juga telah ditetapkan pada Perda No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031 [1].

Kawasan pariwisata pesisir di pantai Amahami dan Ni'u merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata, hal ini berdasarkan pada Perda No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031. Pantai Amahami dan Ni'u yang berada di wilayah Kota Bima memiliki luas wilayah 22,25 km², dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya seperti pantai Ule dan pantai Kolo, letak pantai Amahami dan Ni'u lebih strategis karena berada pada pintu masuk utama Kota Bima [1].

Namun pada kenyataannya kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai kawasan pariwisata tersebut justru terdapat peruntukan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan tata ruang, yang seharusnya dalam Perda No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011–

2031 menyatakan wilayah Pantai Amahami dan Ni'u sebagai kawasan pariwisata dan perdagangan dan jasa [1]. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang sesuai dengan tata ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang sungguh-sungguh.

Mekanisme insentif dan disinsentif yang merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang dengan jelas pada UU No.26 tahun 2007 dianggap mampu untuk mendorong perkembangan kota dan dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan kota atau upaya pengarahannya pada perkembangan yang berdampak positif untuk mengefektifkan pembangunan/rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

1. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana kondisipengendalian pemanfaatan ruang yang telah berjalan pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u?
- Bagaimana mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata

pesisir pantai Amahami dan Ni'u berdasarkan instrumen insentif dan disinsentif?

2. TUJUAN

- Untuk mengetahui kondisi pengendalian pemanfaatan ruang yang telah berjalan pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u.
- Untuk merumuskan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u berdasarkan instrumen insentif dan disinsentif

B. METODE PENELITIAN

1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan yang dimulai dari bulan Maret Tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2017

2. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap nilai dan norma hukum untuk mempelajari kaedah hukum yang dengan mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan

4. PENGUMPULAN DATA

a) Data primer

- Observasi Lapangan dan Dokumentasi Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi lapangan dan dokumentasi yaitu kegiatan melihat secara langsung pada kawasan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi saat ini, sebagai gambaran mengenai kawasan penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan data visual pada kawasan penelitian.
- Adapun sesi wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian, pada sesi wawancara berbentuk wawancara tak terstruktur dikarenakan pewawancara atau peneliti tidak memberikan pilihan jawaban kepada responden

b) Data Sekunder

Merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan melalui instansi terkait seperti Dinas PU Kota Bima, BAPPEDA Kota Bima, Dinas Tata Kota Bima, Dinas Pariwisata dan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Undang-undang Nomor.27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

5. TEKNIK PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA

- a) Pengolahan Data
- b) Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.
- c) Analisis Kebijakan Publik
- d) Analisis Kebijakan Publik yaitu Cara untuk mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (penentuan pilihan-pilihan alternatif) dan untuk menentukan kebutuhan masa depan akan informasi yang *policy relevant* (Walter Williams, 1971).
- e) Analisis Deskriptif Kualitatif
- f) Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka, yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. (Wolf dan Tymiz dalam sukardi (2006: 2).

6. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan disepanjang koridor pantai Amahami dan Ni'u, pengambilan yang menjadi dasar lokus penelitian adalah dikarenakan kawasan Amahami Niu merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata dan perekonomian dan berada pada gerbang utama Kota Bima serta dikarenakan adanya isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan yang akan dilakukan disepanjang kawasan Amahami dan Ni'u dalam menjadi Kawasan Amahami sebagai sebuah wajah kota Bima.

7. VARIABEL PENELITIAN

Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan variabel penelitian merupakan atribut/sifat/nilai dari orang/obyek/kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Tabel 1. VARIABEL PENELITIAN

No	Variabel	Sub Variabel	Definisi
1.	Pengendalian Pemanfaatan ruang	Insentif dan Disinsentif	Insentif merupakan salah satu bentuk pemberian dari pemerintah yang dapat mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana pola ruang, sedangkan disinsentif merupakan salah satu bentuk pemberian dari pemerintah yang dapat menghambat atau menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang
1.	Pemberian Insentif dan Disinsentif	Insentif Fiskal dan No Fiskal	Insentif Fiskal merupakan suatu bentuk pemberian dari pemerintah yang berupa pemberian Kompensasi, sewa ruang, urus saham, keringanan pajak dan keringanan retribusi, sedangkan untuk insentif no fiskal berupa pengadaan sarana prasarana (fiskal) serta kemudahan proses perizinan, semua ini diberikan agar terciptanya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana pola ruang.
		Disinsentif Fiskal dan No Fiskal	Disinsentif Fiskal adalah berupa pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibayarkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, kemudian untuk disinsentif no fiskal merupakan suatu bentuk pemberian dari pemerintah yang berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, kompensasi, penalti.

C. GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

1. IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi lokasi penelitian, dibagi menjadi dua jenis kondisi fisik lokasi penelitian, yaitu kondisi fisik dasar, yang dimana pembahasan untuk kondisi fisik dasar mengidentifikasi terkait kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi tata guna lahan, serta kondisi DAS di lokasi penelitian, dan untuk kondisi fisik binaan di fokuskan pada mengidentifikasi kondisi kependudukan, kondisi utilitas

jaringan, dan kondisi pariwisata yang berada di lokasi penelitian.

a. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Rasanae Barat merupakan suatu kecamatan yang ada di Kota Bima yang merupakan kecamatan dari lokasi penelitian dan juga merupakan suatu kawasan strategis pariwisata dan kawasan utama sektor perekonomian, hal itu telah tertuang dengan jelas pada RTRW dan RDTR Kota Bima Tahun 2011-2031. Pola ruang kawasan Rasanae Barat terdiri dari beberapa peruntukan ruang seperti perdagangan dan jasa, permukiman serta pariwisata.

Rencana Pola Ruang Kawasan Amahami Niu diindikasikan sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan alam dalam wilayah kota Bima. Rencana pola ruang untuk wilayah perkotaan seperti daerah Amahami dan Ni'u dirumuskan berdasarkan beberapa hal antara lain yaitu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Pada Kawasan Amahami dan Ni'u

➤ Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik menggunakan alat ukur berupa matriks persandingan, yang dimana peneliti mengidentifikasi kesesuaian kondisi eksisting pemanfaatan ruang kawasan Amahami Ni'u yang terkini disandingkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rasanae Barat, setelah mendapatkan hasilnya, peneliti disini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga nantinya arahan dalam mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif dapat tepat sasaran sesuai dengan RDTR Rasanae Barat.

Dalam mengidentifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan Amahami Ni'u diperlukan data mengenai kondisi terkini pemanfaatan ruang di daerah tersebut, dalam kawasan Amahami dan Ni'u pemanfaatan ruang yang terdapat berupa pariwisata, perekonomian, RTH, Perumahan, Pendidikan, Sempadan Pantai dan Industri, lalu kemudian disandingkan dengan data RDTR mengenai kawasan masing-masing.

➤ Hasil Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RDTR Rasanae Barat

Tabel 2. HASIL IDENTIFIKASI KESESUAIAN TERHADAP RDTR RASANA E BARAT

Pola Ruang	Keterangan	Penggunaan Lahan	Hasil
Industri dan Perdagangan	Kawasan Budidaya	Industri	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Bakau	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Industri	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Padang Rumput	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Pendidikan	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Perkebunan	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Perumahan	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Semak Belukar	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Tegalan Ladang	Sesuai
Permisata	Kawasan Budidaya	Wisata	Sesuai
Pendidikan	Kawasan Budidaya	Padang Rumput	Sesuai
Pendidikan	Kawasan Budidaya	Pendidikan	Sesuai
Perdagangan dan Jasa	Kawasan Budidaya	Perdagangan dan Jasa	Sesuai
Perkebunan	Kawasan Budidaya	Padang Rumput	Sesuai
Perkebunan	Kawasan Budidaya	Perkebunan	Sesuai
Perkebunan	Kawasan Budidaya	Tegalan Ladang	Sesuai
Perumahan	Kawasan Budidaya	Perumahan	Sesuai
Rencana Penggunaan Lainnya	Kawasan Budidaya	Padang Rumput Sesuai	Sesuai
Rencana Penggunaan Lainnya	Kawasan Budidaya	Perumahan	Sesuai

2. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN AMAHAMI NI'U BERDASARKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

a. Faktor Pendukung

- **Potensi Pengembangan Fisik**
Pantai Amahami dan Ni'u merupakan daerah pesisir pantai yang berpotensi untuk pengembangan budidaya tambak, mangrove, dan ruang terbuka hijau, dari sini pemerintah dapat memberikan insentif terhadap pengembangan potensi fisik tersebut.
- **Potensi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata**
Seperti yang diketahui bersama sektor ekonomi dan pariwisata merupakan satu kesatuan sektor andalan dalam pengembangan kawasan pariwisata pesisir, jika dalam suatu kawasan telah berjalan sebuah kegiatan pariwisata maka kegiatan ekonomi akan jalan bersamaan, pengembangan ekonomi dan pariwisata pada kawasan pesisir pantai Amahami dan Ni'u berpotensi untuk wisata alam, perdagangan dan jasa serta berupa cafe dan restoran sambil berwisata alam, hal ini tentunya dapat diberikan insentif karena pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR.

b. Faktor Penghambat

- **Masalah Fisik**
Identifikasi masalah fisik merupakan hal yang penting untuk dibahas dalam pengendalian

pemanfaatan ruang, karena bias terjadi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga memberikan hasil yang tidak optimal dan merugikan, masalah fisik seperti ini perlu diberikan disinsentif dalam mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

➤ **Masalah Tata Ruang**

- Tingkat partisipasi dan pendayagunaan RDTR masih rendah oleh masyarakat kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u.
- Kurangnya sosialisasi mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dari aparat pemerintah untuk masyarakat kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u.

3. ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Dilihat dari segi penting dan bermanfaatnya suatu pemberian insentif dan disinsentif ini pada suatu kota, maka Kota Bima Perlu mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur pemberian insentif dan disinsentif pada suatu kawasan pemanfaatan ruang secara lengkap. Setelah melakukan serangkaian analisis pada bab-bab sebelumnya maka disini peneliti memberikan beberapa arahan pemberian insentif dan disinsentif pada pemanfaatan ruang kawasan studi, adapun diantaranya berdasarkan kawasan, luas kawasan, tujuan pemberian insentif dan disinsentif pada suatu kawasan, bentuk insentif dan bentuk disinsentif yang diberikan pada suatu kawasan pemanfaatan ruang amahami Ni'u. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta insentif dan disinsentif dibawah :

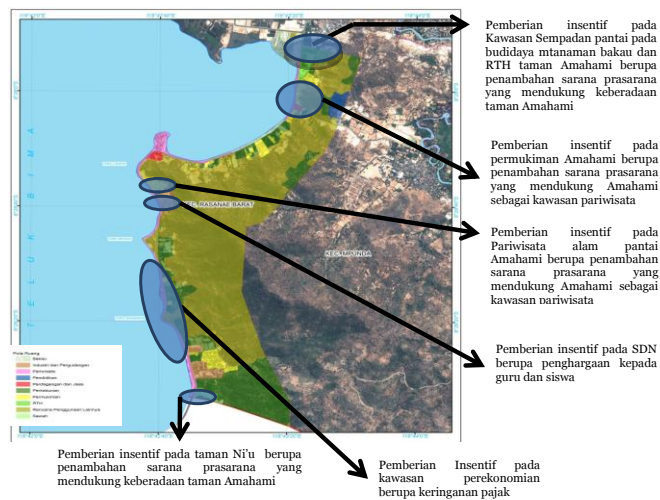
Tabel 3. ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bentuk Insentif	Bentuk Disinsentif	Alasan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Permisata	4.11	Insentif No Fisikal	-	Pemberian insentif no fisikal (fisik) berupa pengadaan sarana prasarana penunjang aktivitas pariwisata agar dapat lebih meningkatkan kawasan Amahami Ni'u sebagai kawasan pariwisata, contohnya seperti penamaan nama-nama pantai yang di bangun tepat berada pada kawasan pantai tersebut seperti pada kawasan pantai tersebut seperti pada kawasan besar
Perumahan	11.42	Insentif No Fisikal	-	Pemberian insentif no fisikal (fisik) berupa pengadaan sarana prasarana pada kawasan perumahan dimaksud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kawasan perumahan tersebut

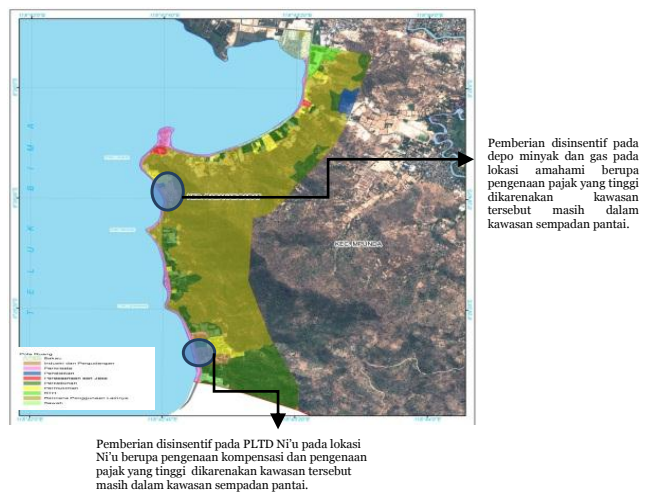
				<p>Contoh seperti pembuatan wc umum dan lampu jalan karena pada kawasan permukiman tersebut masih ada warganya yang tidak punya wc sendiri (pribadi), dan penerangan di kawasan tersebut masih sangat kurang.</p>
				<p>lebih ditekankan berupa penghargaan kepada siswa berupa beasiswa dan penghargaan kepada guru berupa piagam guru teladan, sehingga demikian dapat meningkatkan minat siswa dan guru dalam belajar dan mengajar, sedangkan insentif no fiktal (fiskal) diberikan berupa pengadaan sarana prasarana, dikarenakan ada salah satu sekolah di kawasan tersebut yaitu SDN 77 Kota Bima yang ada di Ni'u yang tidak memiliki sanitas siswa, sehingga kurang amanahnya dalam kegiatan belajar mengajar.</p>
RTH	3.71	Insentif No Fiktal	-	<p>Pemberian insentif no fiktal berupa pengadaan sarana prasarana dapat meningkatkan kualitas RTH.</p>
				<p>sempadan pantai Amahami Ni'u, diharapkan adanya kerjasama antara dengan swasta atau pemerintah daerah lain nya dalam meningkatkan kualitas sempadan pantai Amahami dan Ni'u.</p>
Industri/Perdagangan	5.75	Insentif No Fiktal	-	<p>Dalam RDTN Rasanse Barat industri ini telah direncanakan dikarenakan fungsinya yang sangat besar untuk Kota Bima seperti Depo minyak TBEM BIMA yang berfungsi menyuplai minyak keseluruh pom bensin yang ada di Kota Bima dan PLTD Ni'u yang merupakan salah satu gardu induk yang ada di Kota Bima yang berfungsi sebagai pengalir listrik utama untuk kota Bima, namun karena lokasinya yang berada pada sekitar</p>

				<p>kawasan pariwisata pesisir tentu hal ini tidak sejalan dengan UU No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka diberikan insentif no fiktal berupa kemudahan dalam perizinan. Karena keberadaanya yang sudah sangat lama serta berfungsi bagi bebunaban energi masyarakat Kota Bima.</p>
--	--	--	--	---

Hasil Analisis 2017



Gambar 1. Peta Insentif Amahami Ni'u



Gambar 2. Disinsentif Amahami Ni'u

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- Pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen insentif dan disinsentif sangat membantu dalam pengembangan kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u, dikarenakan adanya pemberian Insentif yang dapat memacu keinginan investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan kegiatan

usaha yang bersangkutan dengan pariwisata pesisir pada daerah Amahami dan Ni'u.

- Terdapat beberapa kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting kawasan dengan Rencana Pola Ruang Amahami Ni'u.
- Adapun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kawasan pariwisata pesisir pada pantai Amahami dan Ni'u yaitu Industri/Pergudangan namun dapat diberikan tindakan berupa disinsentif fiskal yaitu dengan memberikan pajak yang tinggi pada industri/pergudangan tersebut.
- Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penataan ruang pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u yaitu pada faktor pendukungnya terdapat pengembangan potensi fisik, ekonomi dan pariwisata sedangkan pada faktor penghambatnya ditemukan masalah fisik dan masalah tata ruang.
- Dengan belum adanya diberikan Disinsentif pada kawasan pariwisata pesisir pantai Amahami dan Ni'u menandakan rencana pola ruang Rasanae Barat berjalan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini.

2. SARAN

- Bagi pemerintah Kota Bima
Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat memberikan sosialisasi mendalam mengenai pengendalian pemanfaatan ruang terhadap masyarakat sekitar kawasan pariwisata pesisir Amahami dan Ni'u
- Bagi Program Studi PWK UMM
Agar dalam kegiatan perkuliahan dapat melakukan materi lebih mendalam mengenai Perencanaan Tata Ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruangnya.
- Bagi Mahasiswa Planologi
Agar dalam mengambil tugas akhir nanti, dapat mengambil tema mengenai pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen peraturan zonasi atau perizinan, dan diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BAPPEDA. 2012. *Laporan Penyusunan RDTR Kecamatan Rasanae Barat 2012-2028*. Kota Bima
- [2] BPS. 2015. *Kecamatan Rasanae Barat Dalam Angka 2016*. Rasanae Barat. BPS Kota Bima
- [3] Muta'ali, Luthfi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: BPPG Universitas Gadjah Mada.
- [4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2009. *Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*. Jakarta